

BAB III

ANATOMI SOSIAL BUDAYA PPP DI KABUPATEN REMBANG

PPP sebagai partai politik yang di bentuk berdasarkan fusi empat partai menjadikan PPP memiliki anatomi sosial budaya yang berbeda. Hal ini di sebabkan latar belakang dari masing-masing organisasi massa atau partai politik tersebut memiliki kebudayaan, pola pikir dan kebiasaan yang berbeda pula. Hal inilah yang menjadi corak warna dalam internal partai PPP. Akan tetapi uniknya meskipun PPP memiliki keberagaman budaya dalam setiap ormas atau partai di dalamnya, ajaran yang dianut tetaplah sama, induk dari ajaran Islam yang di anut adalah Ahlusunnah wal jama'ah. Sehingga sebetulnya nilai-nilai ajaran yang di berikan tidak seluruhnya berbeda, hanya saja setiap organisasi ini memiliki cara pandang yang berbeda dalam memaknai *Ahlusunnah wal jama'ah*. Bukan hanya anatomi berdasarkan organisasi massa atau partai yang berbeda, tetapi ada keberagaman umat Islam di salah satu internal salah satu organisasi massa dalam PPP, yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Ada perbedaan kelas, golongan, atau kalangan di dalam NU yang mana perbedaan inilah yang mungkin bisa saja menimbulkan familisme yang terjadi di dalam Partai Persatuan Pembangunan. Contoh yang paling nyata salah satunya terjadi di Kabupaten Rembang. Perbedaan golongan ini sama hampir sama dengan analisis sosial umat Islam yang dilakukan oleh Clifort Gertz, dan tentu saja hal ini diakui pula oleh *local strongman* yang ada di Kabupaten Rembang tersebut.

3.1. Anatomi Sosial Budaya PPP Secara Umum

Secara umum anatomi sosial budaya di PPP diisi oleh masyarakat agama islam dari berbagai golongan. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa PPP terdiri dari empat fusi partai maka bisa terlihat bagaimana bentuk keberagaman budaya di internal partai PPP. Maka dari itu anatomi sosial budaya masyarakat Partai Persatuan Pembangunan juga tidak terlepas dari unsur sejarah, terutama pada saat Orde Baru, karena isi dari partai ini terdapat berbagai kehidupan sosial budaya dari Masyumi, NU, Perti, PSII dan juga Muhammadiyah.

Jika menelisik lebih dalam dari sejarah PPP, anatomi sosial budaya PPP berasal dari masa dimana Islam mulai masuk ke Indonesia tepatnya pada abad ke 8 M. Islam masuk ke Indonesia dibawa melalui perdagangan yang datang dari Gujarat Arab, India dan China. Mereka berdagang dengan berdakwah menyebarkan agama Islam ke Indonesia dengan membawa nilai-nilai *Ahlusunnah wal Jama'ah*. Seiring perkembangan, secara konkrit di wilayah Jawa, agama Islam juga disebarkan oleh *walisongo* yang mengakulturasikan nilai-nilai agama Islam dengan budaya asli di Indonesia khususnya masyarakat Jawa, dengan kata lain dari kalangan *Ahlusunnah wal Jama'ah* budaya tidak di berantas dengan adanya ajaran Islam. Orang-orang yang menganiut dan menyebarkan ajaran dengan nilai tersebut tidak memberantas budaya karena mereka menolak peperangan, bersifat moderat dan anti kekerasan. Sehingga mengakulturasikan budaya menjadi jalan terbaik untuk membuat Islam dapat berkembang pesat. Seiring perkembangan zaman terbukti di Indonesia, Islam berkembang sangat pesat dan nilai-nilai *Ahlusunnah wal Jama'ah* ini yang paling bisa di terima

masyarakat. Orang-orang yang menganut *Ahlusunnah* ini dikenal dengan orang sunni.

Orang-orang sunni di Indonesia membentuk organisasi Islam yang nama akhirnya menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Melalui organisasi ini ajaran agama Islam semakin berkembang peat sampai ke akar rumput, dan segala ajaran agama Islam di Indonesia mayoritas berdasarkan kurikulum yang dikeluarkan dari lembaga tersebut. Ketika masa kemerdekaan, untuk bisa menjaga nilai-nilai Islam di Indonesia dan mempengaruhi kebijakan Negara, kedua lembaga Islam ini membentuk partai politik yaitu partai Masyumi. Partai Masyumi menjadi salah satu partai pemenang pada saat itu selain PNI dan PKI. Seiring keberjalanannya saat pembentukan dasar Negara menurut beberapa kalangan partai Masyumi di duga ingin mendirikan Negara Islam di Indonesia dengan memasukkan syariat Islam ke dalam Pancasila dan terjadi perselisihan dengan orang-orang dari partai PNI dan PKI. Setelah perselisihan tersebut, Nahdlatul Ulama memutuskan untuk keluar dari Masyumi dan mendirikan partai baru yaitu partai NU. Sehingga saat itu ada empat partai Islam pada masa Orde Lama yaitu Masyumi, NU, Perti, PSII. Kemudian Masyumi di bubarkan oleh Soekarno dan membuat partai baru ketika masa Orde Baru yang disebut Permusi. Pada masa pemerintahan Orde Baru, empat partai Islam yaitu NU, Permusi, Perti dan PSII di fusikan menjadi satu dalam Partai PPP. Dan didalam partai PPP ini NU dan permusi di pertemukan kembali dalam satu partai oleh presiden Soeharto. Dengan kata lain menurut berbagai kalangan NU, partai PPP ini merupakan turunan partai Masyumi pada masa lampau meskipun dalam keberjalanannya posisi NU lebih mendominasi dalam partai NU.

Secara garis besar antara NU, Muhammadiyah, Perti dan PSII memiliki perbedaan, namun pada dasarnya berasal dari sumber yang sama melalui *ahlusunnah wal jamma'ah* dan berisi orang-orang sunni. Namun secara politik mereka memiliki berbagai macam perbedaan. Hal pertama yang membedakan antara NU dan Muhammadiyah di Indonesia adalah jika NU berfokus pada Ahlusunnah wal jamma'ah dengan islam tradisional sedangkan Muhammadiyah berfokus dengan Alhusunnah wal jama'ah dengan islam moderat. NU bergerak di bidang keislaman yang banyak juga bercampur dengan budaya tradisional Indonesia. Banyak akulturasi antara agama islam dan budaya Indonesia yang menjadi salah satu jalan dakwah dan menjadi prinsip bagi orang NU. Oleh karena itu NU kebanyakan di isi oleh masyarakat tradisional di desa. Sedangkan Muhammadiyah sebagai islam moderat yang berfokus pada pengetahuan untuk perkembangan zaman dan sifatnya universal. Karenanya di Indonesia banyak universitas-universitas islam berbasis Muhammadiyah. Dan mereka banyak mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan di Indonesia. Oleh karena itu, Muhammadiyah cenderung diisi oleh kaum muslim menengah keatas yang mampu memiliki pendidikan tinggi.

Prinsip perbedaan dari keduanya adalah pada hal-hal yang bersifat *dhohir* atau tersurat dari ajara agama Islam atau yang ada di Al-Qur'an. Orang Muhammadiyah lebih memilih untuk menghilangkan hal-hal yang dhohir yang belum jelas penjelasannya di dalam Al-Qur'an, sehingga hal-hal yang belum jelas tersebut apabila di laksanakan hukumnya menjadi bid'ah mereka mengenalnya dengan islam yang murni. Sedangkan NU, hal-hal dhohir di dalam Al-Qur'an tidak di hilangkan tetapi memungkinkan ada penjelasan-penjelasan lebih lanjut di

dalam sebuah kitab yang di sebut dengan kitab Kuning. Hal tersebut berdasarkan dengan ajaran Abu al-Hasan al-Asyari, *ahlusunnah wal jamma'ah* yang diajarkan Kiai Maimon memiliki perumusan-perumusan baru yang berasal dari *Ahlusunnah wal jamma'ah* yang telah ada –yang juga dianut oleh Muhammadiyah— dan konsep berfikir yang diberikan disini adalah untuk memisahkan dengan ajaran-ajaran dari Muktazilah, Syiah dsb. yang tentunya pada masa itu di Mesir ajaran tersebut sudah muncul. Oleh karena itu, selain melalui Al Qur'an dan Hadist, orang NU juga mempejalari dan menggunakan Kitab Kuning sebagai salah satu rujukan dalam kehidupan beragama.

Organisasi selain NU dan Muhammadiyah, ada juga Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) yang mana perti juga penganut dari *ahlusunnah wal jamma'ah* dan mengalami berbagai macamperbedaan yang sama seperti NU dan Muhammadiyah, tetapi di Indonesia perti ini posisinya berada di Sumatra Barat pusatnya di Bukittinggi. Perti berfokus untuk mengembangkasn sekolah, pemersatu ulama tradisional dan sebagai benteng bagi pergerakan kaum muda Muslim di Sumatra pada saat itu. Di Perti terdapat dua golongan yang bersiteru karena ada perbedaan paham yang di anut yaitu antara golongan Tua dan Muda (Fathoni, 2016). Golongan tua merupakan golongan yang mengikuti Abu al-Hasan al-Asyari sepaham dengan orang NU. Sedangkan kaum Muda bergerak melakukan pemurnian kembali ajaran islam dan melakukan berbagai peKiaiaruan dengan berdirinya madrasah di Sumatra.

Golongan terakhir dalam internal PPP yaitu PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia). Partai ini muncul dari Syarikat Dagang Islam yang di bentuk oleh H.O.S Tjokroaminoto pada tahun 1905 di Solo. Partai ini di bentuk untuk

menyingkirkan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada saat itu. Partai ini awalnya bernama PSI (Partai Syarikat Islam) yang mana pada saat itu PSI mendukung upaya Soekarno untuk menyatukan partai politik yang bersiteru saat itu –PSI dan PKI—dengan membentuk PNI (Partai Nasional Indonesia). Aktivitas PSI pada saat itu banyak terhambat dan tertekan dengan adanya tekanan dari penjajah seperti Belanda dan Jepang. Disisi lain, pergerakan Islam di Indonesia yang cukup kuat saat itu untuk mencegah menyebarnya PKI di Indonesia. Hingga pada masa penjajahan Jepang, Jepang membentuk Masyumi untuk mengendalikan Islam di Indonesia pada saat itu.

Jika melihat dari gambaran berbagai latar belakang tersebut tentunya kita dapat mengetahui secara jelas bagaimana anatomi sosial budaya masyarakat PPP yang tentunya memiliki berbagai perbedaan karena permasalahan masing-masing. Di awal kepengurusannya tentu distorsi diantara beberapa golongan dengan berbagai latar belakang tersebut sangat terasa hingga pada akhirnya setelah reformasi mereka memisahkan diri membentuk partai-partai baru dengan beberapa golongan sepemahamnya kembali selayaknya mengulang sejarah namun memiliki berbagai nama baru. Misalnya saja dari golongan NU membentuk PKB, Muhammadiyah membentuk PAN, dari Perti (tarbiyah) membentuk PKS dsb. Hingga untuk saat ini PPP tentunya lebih kuat di NU-nya dan mungkin untuk golongan lain selain NU sudah mulai berkurang, apa lagi di Rembang sudah tidak ada lagi. Hal ini juga di terangkan oleh pendapat salah satu pengurus DPC PPP Rembang yang mengatakan:

“(Perti, PSII, Parmusi) sudah gak ada di Rembang. Kalau di Rembang cuma NU aja.

Sejak awal PPP berdiri, NU adalah kelompok agama terbesar dan terbanyak di Indonesia. Sehingga meskipun sudah terpecah dengan menjadi partai baru tetapi beberapa kiai NU yang ada di PPP enggan untuk pindah ke lain partai, contohnya Kiai Maimoen dan Kiai Thoyfoer. Dan dari kiai-kiai yang seperti inilah PPP dapat bertahan dari perpecahan partai tersebut.

3.2. Anatomi Sosial Budaya PPP di Kabupaten Rembang

Apabila kita merujuk pada pendapat Clifford Gertz dalam bukunya “*The Religion of Java*” mengenai golongan masyarakat Jawa yang terdiri dari tiga golongan yaitu Abangan, Santri, Priyayi, maka kondisi masyarakat PPP Rembang juga tidak jauh berbeda dari itu meskipun memiliki definisi yang berbeda. Penjelasan struktur sosial yang dimaksud oleh Clifford Gertz secara singkat yaitu : (1) golongan Abangan adalah orang-orang yang berpusat di pedesaan dan menekankan aspek animanistik, mereka melakukan ritual-ritual yang berkaitan dengan usaha pengusiran makhluk halus/setan ; (2) golongan Santri adalah orang-orang yang berpusat di pasar atau tempat perdagangan dan selalu menekankan aspek-aspek Islam, melakukan upacara-upacara keagamaan yang sudah di gariskan dalam Islam ; (3) golongan Priyayi adalah orang-orang yang berpusat di kantor pemerintahan atau di kota dan menekankan aspek-aspek agama Hindu, suatu kompleks keagamaan yang menekankan hakikat *alus* sebagai lawan dari *kasar* yang di wujudkan dalam simbol-simbol, ettika, tarian, dan berbagai bentuk kesenian, bahasa dan pakaian. Jika kita lihat secara kebudayaan, santri abangan priyayi benar-benar memiliki budaya yang berbeda yang mengarah pula pada strata sosial masyarakat. Abangan yang berada di desa menjadi masyarakat kelas bawah dengan latarbelakang para petani, santri menjadi kelas menengah dengan

berlatarkan orang berpendidikan dan priyayi menjadi kelas tertinggi karena mampu menduduki pemerintahan menjadi kelas penguasa.

PPP memiliki anatomi sosial masyarakat yang didalamnya ada satu kesamaan dengan teori Clifford Gertz tersebut. Penulis menggolongkan mereka ke dalam tiga golongan kaum nahdliyin. Hal ini bertujuan untuk membedakan bagaimana peran mereka di dalam pergerakan politik PPP. Golongan pertama yaitu kelompok masyarakat nahdliyin, kedua kelompok santri nahdliyin, ketiga kelompok kiai nahdliyin. Ketiga golongan tersebut merupakan kaum nahdliyin karena mayoritas pemilih dan penggerak politik PPP adalah orang-orang NU. Hal ini juga berdasarkan pendapat dari salah satu pengurus PPP Rembang yang menyebutkan :

“Kalau di Rembang dari sekian ribu suara di PPP pemilu tahun 2014 itu hanya sekedar 50% golongan santri. NU, kayaknya non Muhammadiyah kalau di PPP.”

Mayoritas diisi oleh orang-orang dari NU baik simpatisan ataupun pengurus organisasi. Inilah yang melatarbelakangi penulis hanya menggolongkan dari NU. Tentu tidak mengesampingkan bahwa di Rembang juga ada masyarakat yang tidak tergabung dengan NU.

Pertama, kelompok masyarakat Nahdliyin penulis menggambarkan mereka yang tinggal di lingkungan nahdliyin, mengikuti seluruh kebudayaan dan ajarannya karena terpengaruh oleh kondisi sosial masyarakat yang di gerakkan oleh Nahdlatul Ulama. Dalam struktur sosial masyarakat Partai Persatuan Pembangunan mereka merupakan simpatisan partai dan sumber suara bagi partai. Meskipun mereka tidak memiliki ikatan secara langsung, tetapi mereka menerima

ajaran melalui kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh pesantren dan terpengaruh juga dengan nilai, budaya atau paradigma yang di ajarkan oleh para kiai Nahdlatul Ulama dalam lingkungan masyarakat tersebut. Masyarakat tradisional nahdliyin memiliki budaya-budaya paguyuban dan wilayah perkampungan mereka turut pula di sibukkan dengan kegiatan keagamaan seperti yasin tahlil, pengajian kitab dan kegiatan sosial agama lainnya yang mana terkadang juga masih kental dengan budaya akulturasi antara adat jawa “kejawen” dengan agama Islam. Dengan kata lain budaya khas jawa masih belum hilang di lingkungan masyarakat nahdliyin meskipun sudah berakulturasi dengan ajaran Islam.

Orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka seluruh masyarakat Rembang terutama wilayah Sarang dan Lasem yang menjadi simpatisan partai terkhusus dalam kasus ini adalah PPP. Peran mereka adalah menjadi salah satu lumbung suara PPP dalam pemilu yang diikuti. Selain itu mereka biasanya berperan sebagai pengurus partai PPP di tingkat ranting atau anak cabang. Masyarakat nahdliyin ini adalah orang-orang yang terus menjaga kestabilan dari kegiatan politik partai. Antusias mereka menjadi gambaran bahwa PPP masih dibutuhkan oleh masyarakat. Jika mereka tidak lagi aktif berkontribusi mengikuti atau turut meramaikan kegiatan PPP, maka bisa di katakan PPP bisa hancur. Peran terbesar mereka yang paling dinanti adalah dengan memberikan hak suaranya kepada PPP saat pemilu.

Kedua, kelompok santri nahdliyin yaitu para santri dalam pesantren berbasis Nahdlatul Ulama yang mana mereka mempelajari pelajaran agama Islam dengan menyesuaikan aspek-aspek budaya yang di miliki oleh Nahdlatul Ulama itu sendiri. Dalam struktur sosial Partai Persatuan Pembangunan mereka bukan

hanya menjadi simpatisan tetapi juga menjadi pendukung setia dengan menjadi timses bagi partai, mengajak masyarakat dan orang dilingkungannya untuk memilih PPP menjadi partai pilihannya. Mereka selalu dilibatkan menjadi para penjaring suara partai. Apapun yang nasihat atau perintah yang diberikan oleh para kainya tidak pernah di tolak termasuk dalam urusan partai sekalipun. Meskipun secara keilmuan politik mereka tidak memahami bagaimana politik partai itu bekerja, namun karena amanah yang diberikan oleh kiai itu sangat penting, maka mereka pun akan menganggap itu juga sebagai petunjuk yang harus mereka lakukan. Para santri inilah yang sesungguhnya menjadi penguat PPP disaat masyarakat mungkin sudah mulai beralih ke partai lain.

Golongan inilah yang dimaksud, golongan yang menurut Gus Aang memiliki pola kehidupan yang sesuai dengan teori Clifford Gertz. Dimana mereka adalah orang yang sangat santun dan tunduk kepada pada kiai, mereka juga lebih di kenal sebagai masyarakat yang ahli dalam bidang agama. Oleh sebab itu mereka menjadi bekal untuk menjadi pertahanan PPP demi menjaga Islam sebagai platform PPP. Sesuai dengan pernyataan sebagai berikut :

“Satu, memang dari jalur keulamaan, yang kedua dari jalur keturunan para ulama yang tadi, ada keluarga santrilah kalau kita meminjam Clifford Gertz, nah itu kalangan santri yang ada di situ. Nah itu yang menjadi bekal di PPP tentunya”¹³

Kelompok santri nahdliyin dalam konsep ini diantaranya adalah santri-santri yang masuk dalam pondok pesantren di bawah asuhan para kiai yang memiliki afiliasi politik. Mereka berperan untuk menjadi pengurus partai membantu para tokoh

¹³ Hasil wawancara dengan pengurus DPW sekaligus Anggota DPRD Jawa Tengah

partai, kiai, atau putra kiai di dalam partai, atau menjadi simpatisan penjarang suara partai. Mereka inilah pondasi utama kekuatan PPP terutama di Rembang. Karena PPP di bentuk oleh kiai dan di ikuti para santri, maka santri inilah sebagai kepanjangan tangan dari apa yang di cita-citakan para kiai di dalam PPP. Mereka yang akan menjadi kader-kader militant di PPP. Hal ini dibenarkan juga oleh Gus Aang yang mengatakan :

“kader PPP atau Partai PPP itu banyak diisi oleh kalangan santri dari NU, akan kader militannya itu ya kalangan santri menurut saya. Disamping itu, secara survei memang kantong-kantong PPP itu di tempat-tempat ya santri paling taat. Itu nanti ada kategorisasinya, itu termasuk yang paling taat itu. Apalagi di daerah pemilih sini kan, itu rata-rata santri semua, makanya kalo disini acara-acara pake sarung.”

Oleh karena itu, golongan inilah salah satu investasi terpenting PPP yang berusaha untuk dipertahankan dan diperluas. Karena santri adalah orang-orang yang paling taat kepada para kainya dimanapun kiai tersebut berada, baik di pondok pesantren, di rumah, di partai dsb.

Ketiga, kelompok kiai nahdliyin yaitu para kiai dalam Nahdlatul Ulama yang juga memiliki afiliasi dengan partai atau merangkap juga menjadi politisi, mereka adalah orang-orang terhormat dalam Nahdlatul Ulama karena mereka adalah seorang kiai besar, keturunan kiai besar, atau santri yang berhasil menjadi kiai atau politisi. Kelompok ini adalah orang-orang yang mampu mempengaruhi bukan hanya dalam kebudayaan tetapi juga politik dalam masyarakat. Mereka orang yang berhasil mendirikan pesantren atau masuk kedalam sistem Negara secara langsung. Kelompok ini berisi dengan tokoh-tokoh besar ternama Nahdlatul Ulama baik di kenal sebagai seorang kiai atau politisi sekalipun seperti contohnya Kiai Haji Maimoen Zubair yang menjadi bahasan pada skripsi ini.

Hamzah Haz salah satu politisi yang berhasil membesarkan Partai Persatuan Pembangunan setelah dilanda konflik internal, dan dimasa sekarang ada para keturunan Kiai Maimoen Zubair, Kiai Thoyfoer, dll. Mereka menjadi orang yang sudah pasti di dengar oleh masyarakat tradisional nahdliyin dan para santri.

Para kiai tersebut menjadi satu-satunya tempat rujukan bagi masyarakat dan santri. Oleh karena itu, di Partai Persatuan Pembangunan pun merekalah orang-orang yang berhasil mengambil keputusan-keputusan politik partai. Meski tidak menuntut kemungkinan dalam keberjalanannya terjadi konflik internal antar kiai, namun itu tidak menghilangkan rasa hormat masyarakat nahdliyin dan para santri. Bukan hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi beberapa dari para kiai ini juga merupakan pendiri pondok pesantren, pemilik madrasah, pemilik bisnis ekonomi masyarakat, yang mana kekuasaan ini juga di jalankan oleh para santri atau masyarakat nahdliyin sekalipun. Keinginan PPP untuk menciptakan masyarakat madani berasaskan Islam membuat PPP juga harus menguasai segala lini mulai dari ekonomi, politik, sosial dan budaya.

3.3. Relasi Kiai dan Santri yang Terbawa di Kultur Partai Politik Modern

Relasi yang dibangun oleh seorang kiai kepada santri yang sangat baik, mampu menciptakan kultur budaya yang khas di internal partai Islam, khususnya PPP. Relasi yang dibangun ini menjadi pondasi utama bagaimana PPP masih bisa bertahan sampai saat ini meskipun telah mengalami berbagai konflik internal yang membuat partai tersebut terpecah dan banyak menciptakan partai baru setelah keluar dari PPP. Relasi yang kuat antara kiai dan santri ini secara tidak sadar membawa kultur yang serupa di dalam partai politik khususnya PPP di era modern sekarang ini.

Kultur budaya yang di bawa adalah kultur dimana seorang santri harus patuh kepada kiainya. Budaya “*Nderek dawuh e kiai*” seperti pada penjelasan sebelumnya merupakan salah satu kultur yang tidak bisa lepas oleh santri. Bagi mereka pula, Pak Kiai menjadi salah satu orang yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena di pondok pesantren, para santri di ajarkan untuk patuh dan taat kepada orang tua, dan kiai sebagai orang tua mereka di pondok adalah orang yang wajib ditaati. Tentunya hal ini merupakan salah satu ajaran terpuji dari pendidikan di pondok pesantren. Santri menjadi orang yang sangat penurut, sopan, taat dan patuh. Bagi kehidupan sehari-hari mereka, kepatuhan ini di anggap sebagai keberkahan yang mendatangkan pahala. Jika mereka tidak patuh kepada para kiai mereka percaya akan mendatangkan dosa bagi mereka.

Kepatuhan yang dilakukan para santri ini juga membawa mereka dalam kepatuhan berpolitik. Sebab, beberapa kiai juga ada yang terjun ke politik, maka tidaklah salah jika para santrinya juga mengikuti jejak kiainya. Termasuk dalam hal yang sangat mendasar sekalipun dalam berpolitik yaitu menetapkan / menentukan pilihan. Sebagai masyarakat yang mungkin tidak mengenal secara langsung siapa wakil rakyatnya atau kepala daerahnya, tentu setiap orang membutuhkan salah satu arahan yang bisa menuntun kepada siapa pilihan mereka dijatuhkan. Bagi para santri tidak lain dan tidak bukan adalah kiainya. Maka tanpa berfikir panjang dan di perintah, sudah pasti apa yang menjadi pilihan kiai menjadi pilihannya para santri juga. Hal ini di benarkan oleh salah satu santri di Rembang yang saya temui, ia mengatakan :

“Santri iku gak usah di kampanyekan yawes manut kiaine, pokoke gak nyeleneh-nyeleneh manut kiaine”¹⁴

PPP sebagai partai yang di besarkan oleh para kiai membuat seluruh santri termasuk kader partai PPP patuh kepada para kiai. Bahkan seluruh kebijakan partai harus berdasarkan pada arahan para kiai sebagai Majelis Syari’ah atau biasa dikenal Dewan Pertimbangan Partai. Majelis ini berdiri bukan hanya di struktur setingkat pusat, namun sampai ke tingkat cabang dan ranting. Pendapat ini diperkuat oleh salah satu pengurus PPP yang mengatakan :

“Iya, PPP itu setiap daerah ada kiainya. Pasti ada kiainya. Karena di PPP selain ada pengurus harian ada juga namanya Majelis Syari’ah, itu isinya kiai semua, orang-orang sepuh semua. Semua kebijakan partai ya pasti larinya ke sana dulu.”¹⁵

Tentunya hal ini menunjukkan bahwa pengaruh dari para kiai sebagai pembesar partai atau *local strongman* sangat kuat hingga sedikit banyak diturunkan juga kepada para keturunannya. Posisi kiai yang sangat kuat tersebut tentunya disebabkan karena ada pula pihak *inferior* di bawahnya yaitu santri. Sebagai kliennya, santri akan selalu mengikuti kemanapun kiai itu pergi dan memenuhi seluruh permintaannya. Relasi yang dibangun antara kiai dan santri yang disebut relasi *patron-client* ini menjadi salah satu relasi yang pada akhirnya tercipta di partai politik modern sekarang ini.

Budaya “*Nderek dawuh e kiai*” sebetulnya menggambarkan bentuk mengikuti pertimbangan kiai yang mereka minta terhadap hal-hal yang mereka diskusikan kepada kiai tersebut. Permintaan pertimbangan yang biasa di lakukan oleh para santri kepada kiai biasanya adalah seputar masalah hidup, pekerjaan,

¹⁴ Hasil wawancara dengan salah satu santri di Rembang

¹⁵ Hasil wawancara dengan salah satu pengurus PPP

jodoh dsb. Ini memang selalu dan rutin dilakukan oleh para santri pondok yang menghadapi berbagai permasalahan, kebimbangan atau membutuhkan petunjuk, tentu orang yang akan dituju pertama kali adalah kiainya. Pendapat ini berdasarkan penjelasan langsung oleh Gus Yasin putra Kiai Maimoen yang melihat dan merasakan sendiri bagaimana para santri meminta pertimbangan saat sowan pada kiainya. Ia mengatakan :

“Ada masalah keluarga tanya ke kita, ekonomi pun tanya ke kita bagaimana, iya termasuk politik, dan ora politik tok mbak. Jodoh juga tanyanya ke Pak Kiai”¹⁶

Pernyataan Gus Yasin inilah yang menunjukkan bahwasanya budaya untuk *“nderek dawuh e kiai”* sejatinya dilakukan untuk meminta berbagai pertimbangan masalah hidup. Namun kebiasaan ini ternyata tidak lepas saat mereka terjun ke partai politik. Sehingga untuk memutuskan sebuah perkara yang ada di partai, para santri melakukannya dengan meminta pertimbangan dari para kiai. Pertimbangan yang biasa diminta adalah hal-hal yang besar dan sangat riskan, misalnya pemilihan ketua partai, calon yang akan diusung, rekonsiliasi partai dengan partai lain, pilihan politik partai, dsb.

Budaya *“nderek dawuh e kiai”* secara langsung menggambarkan bahwasanya pemimpin mereka utamanya haruslah seorang kiai, termasuk didalam partai sekalipun. PPP menjadi partai yang sangat kuat dengan simbol kiai, sehingga selain kiai atau keturunannya akan cukup sulit untuk bisa berada di posisi ketua. Hal ini dikarenakan setiap permasalahan partai yang sangat vital menjadi wewenang kiai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memberikan pertimbangan, pernyataan sikap atau memberikan fatwa. Terkecuali

¹⁶ Hasil wawancara dengan Taj Yasin di Semarang pada bulan Februari 2018

ada kondisi dimana seorang kiai atau keturunannya tidak bisa menempati posisi tersebut, dengan orang yang bukan keturunan kiai tersebut berkerja keras membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi seorang ketua partai dengan meyakinkan anggota formateur disertai restu dari para kiai. Pendapat terkait hal itu di perkuat dengan pendapat salah satu pengurus sekaligus anggota Dewan DPRD yang mengatakan :

“Ya tetep nanti PAC-PAC memilih ketua DPC ya ketua PAC punya peran, DPC-DPC memilih ketua DPW ya ketua DPC punya peran, dan seterusnya. Tapi Beliau selalu punya peran untuk di mintai pertimbangan.”¹⁷

Dari pernyataan tersebut sudah jelas, meskipun partai memiliki mekanisme pemilihan ketua secara kelembagaan tetapi tetap pada akhirnya keputusan dari sang kiai-lah yang menjadi pertimbangan. Pertimbangan yang di berikan oleh kiai ini yang sedikit banyak mempengaruhi pilihan para kader PPP. Namun sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan bagi para santri atau kader militant untuk bisa menempati posisi-posisi strategis di partai. Beberapa pengurus partai mereka bukanlah puta kiai atau seorang kiai, namun juga ada kader militan atau para santri kiai atau murid-murid dari para santri tersebut. Hal ini bisa mereka capai selama mereka memiliki relasi yang kuat pula dengan dengan para kiai atau petinggi partai. Selama mereka mampu menunjukkan integritas mereka di dalam partai, meskipun mereka tentunya harus menghadapi beberapa rintangan terkait dengan beberapa budaya sosiologis yang di bawa santri kedalam partai tersebut.

Namun, ternyata budaya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekelompok kiai tersebut sepertinya kurang pas jika di terapkan di dalam partai

¹⁷ Hasil wawancara dengan pengurus DPW PPP Jateng sekaligus Anggota DPRD Jateng

politik terkhusus PPP, karena selama keberlangsungan dinamika politik di dalam partai masih ada beberapa kesenjangan dari beberapa pihak yang merasa kurang sejalan dengan keputusan yang diambil oleh sang kiai. Meskipun, santri sangat patuh kepada kiainya, tetapi jika menyangkut urusan politik, pikiran para kader atau santri tersebut bisa berbeda dengan apa yang diinginkan oleh kiai mereka, karena setiap orang memiliki cara berfikir politiknya masing-masing. Hal ini di buktikan, beberapa dari kader PPP terkadang juga sedikit banyak kurang menyetujui apa yang menjadi keputusan partai yang mana hal tersebut ditentukan oleh para “kiai” di dalam internal mereka. Meski demikian mereka tetap harus mengikuti apa yang sudah di *dawuh*-kan oleh kiai mereka, karena menurut mereka itulah yang terbaik.

Salah satu contoh kasusnya terjadi di internal DPC PPP Rembang. Beberapa pengurus DPC PPP ingin mengusung putra kedua dari Bupati Rembang Abdul Hafidz untuk menjadi calon legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah mewakili Rembang. Namun, di dapil Rembang tersebut telah menjadi salah satu daerah pemilihan bagi Gus Azis, menantu KH. Thoyfoer. Bagi pengurus DPW sangat bimbang dalam menentukan siapa yang akan mewakili Rembang dengan nomer urut 1. Karena jika dua-duanya di masukkan dalam satu dapil untuk bersaing maka suara PPP yang masuk ke para tokohnya akan terpecah, karena keduanya membawa ketokohan mereka masing-masing.¹⁸

Dampak dari posisi keluarga KH. Thoyfoer dalam internal partai memiliki *legal standing* yang lebih kuat di banding dengan Bupati Rembang, maka nomer urut 1 untuk dapil 3 Rembang, Pati, Blora, Grobogan tetap jatuh ke tangan Gus

¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus DPC PPP Rembang.

Azis berdasarkan hasil rapat formateur DPW, penolakan itu terjadi bisa saja karena putra Bupati baru menjadi pengurus PAC dan dianggap belum siap jika harus *nyaleg* setingkat provinsi. Salah satu pendukung putra Bupati mengatakan :

*“Kemarin kita temen-temen se-kabupaten Rembang itukan mengusulkan putranya Bupati yang jadi pengurus PAC tadi. Calon provinsi sih. Cuman karena DPW tidak menghendaki.”*¹⁹

Pengurus yang mengusulkan putra Bupati tersebut berfikir ada kepentingan pribadi yang ingin di pertahankan dari pengurus DPW terkhusus pada Gus Azis.²⁰ Dan bagi mereka yang mengukung Gus Wafa putra Bupati, menurutnya mereka berjuang untuk kepentingan partai, karena berpendapat Gus Wafa memiliki pengaruh yang cukup kuat di Rembang melalui suara Abdul Hafidz sebagai seorang Bupati dan dianggap mampu meningkatkan suara partai. Disisi lain mereka juga menginginkan ada penerus dari generasi Abdul Hafidz sang Bupati.

“Keluarganya Abdul Hafidz juga ada putranya yang nomer dua. Itu aja kemarin juga di paksakan sama temen-temen. Kita pingin aja simbol satu penerusnya Abdul Hafidz. Itu memang di pengurus PAC tidak terlalu berpeluang.”

Pengurus yang mendukung pihak Bupati tanpa disadari sedikit banyak ingin membuka kesempatan munculnya *familism* yang baru dengan memunculkan tokoh yang dianggap lebih bisa bekerja dan di senangi masyarakat, melalui anaknya Bupati. Selain itu Bupati juga menjadi sosok yang disegani dan di anggap pula sebagai seorang kiai, karena keseganan orang tersebut. Upaya menjadikan Bupati sebagai *patron* juga yang di perkuat dengan posisi anaknya. Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana budaya yang tercipta didalam

¹⁹ Sda.

²⁰ Sda.

partai ini sedikit banyak mirip dengan budaya yang biasa dijalankan dalam pengasuhan pondok pesantren. Jika posisinya adalah pondok pesantren, maka sah saja bagi anak kiai memiliki wewenang di posisi struktural untuk menguasai pondok, karena di pondok anak kiai di didik untuk meneruskan perjuangan ayahnya. Namun ternyata budaya pondok yang seperti ini terbawa pula sampai kedalam pergerakan politik. Upaya untuk menciptakan *familism* baru di partai semakin hari semakin banyak dimunculkan dari kalangan santri sendiri dan hal ini ternyata sudah mengalir di tubuh para santri yang berada di dalam PPP, baik di daerah, provinsi maupun di pusat. Realita yang terjadi adalah seberapa besar para santri tersebut berusaha, pada akhirnya tetap kiai di dalam partai memiliki *legal standing* yang lebih kuat dan relasi yang kuat. Relasi antara kiai-santri dalam wujud kepatuhan tersebut tidak bisa di goyahkan.

Posisi setiap orang didalam partai adalah sama atau sederajat. Siapa pun dan darimanapun latarbelakangnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri menempati posisi struktural apapun. Namun ternyata realita yang ada di dalam partai tidak selalu berjalan demikian. Budaya “*nderek dawuh e kiai*” atau “menginginkan generasi penerus” tetap bisa bermunculan di dalam internal partai. Kondisi yang dirasakan oleh para aktor di internal adalah mereka yang memiliki peran sebagai *patron* merasa sangat diuntungkan dengan adanya kondisi ini, oleh karenanya upaya-upaya untuk mempertahankan budaya tersebut tetap ada. Namun bagi mereka yang berperan sebagai *client*, merasa butuh usaha lebih untuk bisa meraih apa yang mereka inginkan atau membuat keputusan secara pribadi. Karena pada dasarnya konsep yang di tegakkan dalam

PPP adalah bahwa seorang ketua partai memang harus ada unsur kiaiinya. Salah satunya pernyataan dari salah satu pengurus internal PPP :

“Untuk jadi ketua memang ada unsur harus kiai atau keturunannya. Memang secara administrative tidak ada tapi adanya secara moral itu yang di butuhkan. Karena itu seorang pemimpin membutuhkan simbol dan ‘ruh’ (keturunan) yang kuatkan untuk bisa dikenal atau di percaya masyarakat. Nah kalau di PPP ya itu keluarga kiai itu.”²¹

Kuatnya pengaruh kiai tersebut membuat upaya pengurus DPC yang mendukung putra Bupati belum berhasil karena pengaruh Bupati sebagai pengurus partai belum cukup kuat. Disisi lain, Bupati Rembang sendiri sebagai seseorang yang bukan berlatarbelakang politik mampu menjadi Bupati berkat keistimewaan yang di berikan tokoh-tokoh partai PPP yang tidak lain dan tidak bukan adalah para kiai. Sehingga posisi Bupati disini adalah seorang santri, bukan sang kiai.

“Abdul Hafidz keluarganya gak ada yang di PPP. Memang Beliau itu dulu jadi DPR pertama juga bukan pengurus PPP. Jadi Abdul Hafidz jadi pengurus PPP itu permintaan dari bawah masyarakat Pamotan. Dia juga belum pernah yang namanya kerja di partai. Membesarkan PPP juga belum pernah. Cuma Beliau itu dimunculkan oleh tokoh-tokoh PPP.”

Oleh karena itu, meski Bupati memiliki dukungan dari beberapa pihak dari pencalonan anaknya, tetapi ia tetaplah santri dari KH. Maimoen Zubair. Sebagai seorang santri tentunya dia tetap memiliki batasan-batasan yang tidak bisa dilampaui seorang santri kepada kiaiinya atau para keturunannya. Dan tentunya seorang santri tetap akan mengikuti seluruh *dawuh* yang diberikan oleh kiai apapun hasilnya.

²¹ Hasil wawancara dengan pengurus DPC PPP

Bupati bahkan pernah menolak tawaran untuk menjadi Ketua DPC PPP Rembang karena masih ada putra KH. Maimoen Zubair di dalam DPC PPP, yaitu Gus Kamil. Ia lebih memilih untuk mundur dan mengikuti tradisi yang sudah berjalan, yaitu ketua harus dari kalangan kiai. Ia sendiri juga tidak ingin melangkahi Gus Kamil sebagai putra KH. Maimoen Zubair yang menurutnya lebih berwenang untuk menempati posisi tersebut, karena Gus Kamil juga seorang kiaiinya DPC PPP. Pada perhitungan suara, ia bisa memenangkan pemilihan tetapi tetap Bupati memilih untuk mundur meskipun sejatinya kemenangan itu bukanlah keinginannya semata. Salah satu pengurusnya mengatakan:

“Beliau mundur. Itu menurut saya bijaksana sekali, karena itu tadi Beliau menghormati simbol-simbol kiai. Kita kecewa pasti, selaku orang bawah yang ingin PPP itu besar.”

Penghormatan Bupati kepada simbol-simbol kiai tersebut, menunjukkan salah satu bukti bahwasannya relasi yang di bangun oleh kiai dan santri merupakan wujud dari budaya *“nderek dawuh e kiai”* yang ada di pondok pesantren. Ia menjaga kepatuhan seorang santri kepada kiaiinya tanpa di instruksikan secara langsung oleh kiai tersebut. Wujud relasi ini ternyata tidak serta merta hanya terjadi di pondok pesantren Rembang, tetapi memang ajaran yang di lestarikan di setiap pondok pesantren di Indonesia. Budaya dan relasi tersebut memang nyata adanya didalam pondok dalam mempengaruhi segala kehidupan sehari-hari hingga terbawa kedalam politik. Konsep ini di kenal dengan sebutan *tawadhu* oleh para santri.

Jika di pondok di kenal dengan sebutan *tawadhu* atau taat, dalam relasi politik, Hendro Fadli Sari (2016) menyebutnya dengan konsep *Tradisional*

Authority Relationship (kewibawaan tradisional). Nama konsep itu merupakan nomenklatur yang lebih politis untuk menyebut *tawadhu*. Kewibawaan tradisional dijalankan dengan ajaran *tawadhu* namun pondasi yang dibangun adalah untuk membangun relasi politik. *Tradisional authority* menciptakan bentuk kepatuhan berdasarkan kewibawaan sang kiai tanpa memberikan imbalan tertentu tetapi dalam bentuk kesadaran moral sang santri kepada kiainya. Kesadaran moral inilah yang akhirnya membangun bentuk penerimaan atau keikhlasan santri untuk menerima apapun perintah, nasihat atau fatwa yang diberikan tanpa melihat siapa pihak yang untung atau rugi didalamnya. Kewibawaan tradisional berbeda dengan bentuk kekuasaan yang disebut sebagai imbalan atau perampasan (*reward/deprivation*). Tidak seperti imbalan/perampasan, *tradisional authority* tidak melibatkan hitung-menghitung keuntungan-keuntungan pribadi yang didapat oleh si pengikut (Sari, 2013).

Dengan demikian bahwa budaya "*nderek dawuh e kiai*" berlaku secara sosiologis di dalam pondok pesantren sekaligus di dalam partai politik. Dengan kata lain budaya tersebut tidak bisa di pisahkan dari kehidupan santri dan kiai hingga terbawa ke dalam politik. Sehingga relasi *patron-client* dan budaya *tradisional authority* masih berjalan.